

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM MENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR

M Subki Tahyudin¹, A Iskandar.², M Y Saleh.³

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16770

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16770

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16770

^aKorespondensi: Feranny Juliefte

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-08-2015)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-10-2015)

ABSTRACT

The focus of the research is the management of TPU in the city of Bogor, the purpose of this study was to determine the strategy of the City Government in the management of TPU, to investigate the implementation of the government's strategy of Bogor manage TPU and for mengetahui impact strategy Bogor city administration to the user community TPU. The method used in this study is a qualitative method by taking the informant of the two types of informants for Administrative manager of TPU and user communities TPU using techniques snow ball, TPU city of Bogor there are eight TPU, the study focused on four TPU them TPU Gunung Gadung, TPU Cipaku, TPU and TPU Dreded Blender. researchers showed that the provision of land in Bogor City TPU has not been ideal with the needs of the community cemetery. At this time the city of Bogor require five (5) hectares of TPU, the strategy of the City Government in managing the TPU results structured interview stated that the strategy pengelolaan TPU is expected to provide services to the needs of society in a cemetery that is desired and expected by the public, in the implementation of the policy as a strategy management of TPU, the management of TPU is not ideal with the regulations the City Government as the provisions of the management planned, many factors and constraints in managing TPU like availability of land in the city of Bogor is very difficult to get, quality and human resource capacity to be a factor to failure in managing the TPU, lack of socialization management policy to the community of the importance of the TPU management policy, as well as the lack of attention from the Bogor city administration for the management of TPU. the impact of management strategies TPU on society shows that the answer No 54.1% and 45.9% YES answer is public response to the TPU management policy means greater daripada answers No answer Yes to show people are not satisfied with the services provided by the City Government Bogor UPTD Funeral manage TPU.

Keywords: Policies, TPU, Human Resources.

ABSTRAK

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pengelolaan TPU di Kota Bogor, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan TPU, untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemerintah Kota Bogor dalam mengelola TPU serta untuk mengetahui dampak strategi Pemerintah Kota Bogor terhadap masyarakat pengguna TPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil informan dari dua jenis informan yaitu Aparatur pengelola

TPU serta masyarakat pengguna TPU dengan menggunakan teknik snow ball, TPU di kota Bogor terdapat delapan TPU, yang menjadi fokus penelitian kepada empat TPU diantaranya TPU Gunung Gadung, TPU Cipaku, TPU Dreded dan TPU Blender. peneliti menunjukkan bahwa penyediaan lahan TPU di Kota Bogor belum ideal dengan kebutuhan pemakaman masyarakat. Pada saat ini Kota Bogor membutuhkan 5 (lima) hektar lahan TPU, strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola TPU hasil wawancara terstruktur menyatakan bahwa strategi pengelolaan TPU diharapkan dapat memberikan pelayanan akan kebutuhan masyarakat dalam pemakaman yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat, dalam pelaksanaan kebijakan sebagai strategi pengelolaan TPU, pengelolaan TPU belum ideal dengan peraturan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana ketentuan Pengelolaan yang direncanakan, banyak faktor dan hambatan dalam mengelola TPU seperti ketersediaan lahan di Kota Bogor sangat sulit didapat, kualitas dan kapasitas SDM menjadi faktor ketidakberhasilan dalam mengelola TPU, kurangnya sosialisasi kebijakan pengelolaan terhadap masyarakat akan pentingnya kebijakan pengelolaan TPU, serta kurangnya perhatian dari Pemkot Bogor terhadap pengelolaan TPU. dampak dari strategi pengelolaan TPU terhadap masyarakat menunjukkan bahwa dengan jawaban Tidak 54,1% dan Jawaban YA 45,9% merupakan respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan TPU artinya jawaban Tidak lebih besar daripada jawab Ya menunjukkan masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemkot Bogor pada UPTD Pemakaman dalam mengelola TPU.

Kata Kunci : Kebijakan, TPU, Sumber Daya Manusia.

M Subki Tahyudin, 2016, Analisis Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Mengelola Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*.

PENDAHULUAN

1. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 11.850 Hektar, dan terdiri dari enam kecamatan dan enam puluh delapan kelurahan dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
2. Menurut data statistik jumlah penduduk di Kota Bogor pada tahun 2014 sebanyak 1.030.720 jiwa, dengan jumlah yang ada, jika dikorelasikan dengan indeks kematian (pemakai lahan TPU) di Kota Bogor rata-rata pertahun mencapai 8.640 jiwa, lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor jumlahnya ada delapan Tempat Pemakaman Umum (TPU) diantaranya : TPU Gunung Gadung, TPU Cimahpar, TPU Situ Gede, TPU Dreded, TPU Cipaku, TPU Mulyaharja, TPU Blender dan TPU Kayu Manis. Masing-masing dari luas lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bogor jika dijumlahkan luas lahannya mencapai 60,95 hektare atau sama dengan 609,500 M², kebutuhan pemakaian lahan untuk menabu 1 mayat minimalnya 2 meter X 1,5 meter = 3 M², jika dihitung dengan data yang ada, (pemakaian lahan untuk menabu 1 mayat X indeks kematian (pemakai lahan TPU) di Kota Bogor pertahun) = 3M² X 8.640 jiwa = 25.920 M² lahan yang di butuhkan untuk menabu mayat dalam 1 tahun. Belum lagi lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor yang sudah digunakan mulai dari sejak adanya lahan TPU Tersebut ± 75%, kini hanya tersedia 25% lahan tempat pemakaman umum, jika melihat data 25.920 M² lahan yang dipakai dalam 1 tahun, kebutuhan untuk 5 tahun kedepan berapa luas lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Bogor ??
3. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bogor telah meningkatnya jumlah pembangunan untuk tempat tinggal, depstore, hotel, pabrik, tempat wisata dan bangunan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, swasta(perusahaan) dan pemerintah. Hal tersebut membuat menyempetnya lahan kosong di Kota Bogor sehingga mengakibatkan minimnya lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor.
- 4.

MATERI DAN METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Penelitian kualitatif menurut Denzi dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada². Peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.

SAMPEL

Penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Bogor serta empat Lokasi TPU yaitu TPU Dreded, TPU Gunung Gadung, TPU Blender dan TPU Cipaku. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Snow Ball.

Sampel yang ditentukan yaitu berjumlah 126 orang dengan menggunakan wawancara terstruktur di empat TPU, TPU Dreded, TPU Blender, TPU Gunung Gadung dan TPU Cipaku

Teknik Pengumpulan Data.

teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi

Kepustakaan, Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah kepustakaan yang berkenaan dengan Strategi Pemerintah (Kebijakan Publik) yang berasal dari buku pedoman maupun yang berasal dari sumber lainnya yang berkaitan dengan judul Analisis Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor.

2. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studiLapangan, studi lapangan yaitu dengan cara meninjau langsung ketempat lokasi penelitian, peneliti melakukan ini untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal penelitian ini dengan cara :

- a. Observasi adalah teknik memperoleh data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung pada sumber data yang akan dianalisis mengenai Analisis Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor.
- b. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dan kuisisioner penelitian ini diberikan kepada Aparatur pengelola di masing-masing Unit Tempat

Pemakaman Umum (TPU) serta masyarakat pengguna lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor.

- c. Wawancara adalah proses Tanya jawab secara lisan, dan wawancara penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bagian Pemakaman Umum di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor.
- d. Studi dokumentasi

Teknik ini, merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto, dan rekaman kaset..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, Strategi Pemerintah Kota Bogor yang ditentukan dalam mengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebersihan dan Peratmanan Kota Bogor menunjuk UPTD Pemakaman sebagai pelaksana teknis dalam mengelola Tempat pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan Pemakaman, Pemerintah Kota Bogor menentukan kebijakan sebagai bentuk Strategi pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan menyediakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), menurut R.M. Dimiyati Staf bagian pelaporan UPTD Pemakaman mengatakan pada saat ini Pemkot Bogor membutuhkan 5 hektar lahan untuk TPU. Dengan demikian Pemkot Bogor menentukan

kebijakan yang dikeluarkan melalui PERDA Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas, perumahan dan pemukiman dalam pasal 14 dan pasal 15 dengan ketentuan, “diwajibkan bagi pengembang untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan sebagai berikut :

- a. Untuk membangun perumahan tidak tersusun lahan yang diperuntukan TPU dalam kondisi lahan matang seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai.
- b. Pengembang berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang telah ditentukan sesuai peruntukan yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah

Hal tersebut menunjukkan sebagai perwujudan strategi pengelolaan pemkot Bogor dalam menyediakan TPU, artinya Pemkot Bogor dalam menyediakan TPU hanya menggunakan Sumber Dana Pengembang (menurut kepala UPTD Pemakaman, H.Toto Gustoro).

Selanjutnya pada strategi pengelolaan TPU Pemkot Bogor menentukan kebijakan yang dikeluarkan dalam mengelola TPU yang sudah ada dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Bogor melalui UPTD Pemakaman diatur dalam PERDA Kota Bogor No. 06 Tahun 2002 UPTD Pemakaman sebagai pelaksana teknis dalam mengelola TPU di Kota Bogor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan TPU. Dan pada tahap pengelolaan pula Pemkot Bogor menentukan kebijakan sebagai aturan-aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat aparatur pengelola TPU ataupun masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan pemakaman di TPU kota bogor dengan PERDA. Diantaranya :

- a. PERDA No. 04 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Artinya bagi setiap masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan pemakaman diwajibkan membayar retribusi pemakaman (Sewa Tanah)
- b. PERDA Kota Bogor No.06 Tahun 2002 Bab IV Pasal 15 Ayat 2 dan PERDA Kota Bogor No. 04 Tahun 2012 tentang ketentuan umum TPU. Bagi setiap ahli waris yang tidak membayar retribusi (Sewa tanah) makam dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan pembongkaran.

Selain dari itu Pemkot Bogor menentukan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) dialihfungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau(RTH) sebagai mana tercatat dalam PERDA Kota Bogor tentang RTH berdasarkan Undang-Undang Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 1 tahun 2007 tentang pentataan RTH kawasan kota pasal 6 salah satunya Tempat Pemakaman Umum (TPU) menjadikan sebagai taman kota, untuk itu dituntut Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor mengelola TPU dengan menata lebih rapih, indah, aman, nyaman sebagaimana taman sehingga TPU tidak terkesan menyeramkan. Antusias UPTD Pemakaman menyusun rencana kerja guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemkot Bogor dengan menyusun kerja sebagai berikut :

1. Pendataan Inventarisasi Lokasi yang akan dibangun infrastruktur
2. Pembangunan dan penataan infrastruktur TPU
3. Pemagaran Batas Lahan TPU
4. Penataan TPU
5. Penerangan TPU

(sumber Rencana Kerja UPTD Pemakaman Kota Bogor semester 1 tahun 2015)

Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum diKota Bogor

Berbagai ketentuan dan kebijakan yang dibuat dalam mengelola TPU diharapkan pada tahap pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPU mampu diterapkan sesuai yang direncanakan, pada tahap pelaksanaan strategi pemerintah kota Bogor dalam mengelola TPU melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor bagian UPTD Pemakaman dan ditanggung dengan kapasitas SDM yang didistribusikan pada Setiap TPU Dikota Bogor dengan jumlah setiap TPU 9 SDM sebagai petugas Koordinator TPU, diantaranya TPU, Gunung Gadung, TPU Cipaku, TPU Dreded, TPU Blender (lokus penelitian). Dengan kapasitas SDM Sembilan orang diharapkan mampu melaksanakan kebijakan strategi pengelolaan yang direncanakan.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan pengelolaan jauh dari apa yang direncanakan, berbagai agai faktor dan kendala terjadi pada proses pelaksanaan, pada proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPU tidak mencapai angka maksimal, data sebagai soal pertanyaan yang dilontarkan pada aparatur pengelola TPU mengenai poin-poin yang menyangkut tentang pengelolaan TPU , data membuktikan.

Tabel 4.28 hasil wawancara Aparatur Pengelola TPU di Empat TPU

No	Nama TPU	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	TPU DREDED	8	5
2	TPU BLENDER	8	5
3	TPU CIPAKU	8	5
4	TPU GUNUNG GADUNG	9	4
JUMLAH		33	19
Jumlah keseluruhan Soal		52 soal pertanyaan	
Jumlah Informan		4 orang dari 24 informan yang bersedia diwawancara	

Artinya pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPU jika dihitung $33/52 \times 100\% = 60,3\%$ (jawaban YA) $19/52 \times 100\% = 30,7\%$ (jawaban TIDAK) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPU hanya mencapai 60,3 % tidak mencapai angka 100%. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor :

1. Kualitas SDM yang tidak mumpuni Minimnya pendidikan aparatur pengelola TPU hanya ditunjang dengan pendidikan SMP-SMA, sehingga tidak laksanakan kebijakan pengelolaan yang semestinya diterapkan akibat dari ketidakmampuan kekuatan dalam menegakan peraturan.
2. Kapasitas SDM tidak memadai

Dengan lahan TPU yang luas mencapai ribuan hektar dan terisi oleh beribu-ribu makam mengakibatkan Aparatur TPU tidak bisa mengurus TPU.

3. Ketidakfahaman Masyarakat akan ketentuan kebijakan pengelolaan TPU, masyarakat tidak mengerti (sadar) atas peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaan TPU, padahal peraturan dibuat hanya untuk kesejahteraan rakyat.
4. Kondisi Sosial ekonomi Masyarakat Keterbelakangan kondisi ekonomi masyarakat pengguna TPU serta kondisi sosial budaya masyarakat yang masih memegang kultur serta keyakinan yang kuat sehingga masyarakat enggan melihat peraturan.
5. Kurangnya pengawasan dari pihak UPTD pemakaman terhadap Koordinator TPU.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan TPU tidak efektif seperti penataan TPU sebagaimana Rencana Kerja yang ditetapkan TPU menjadi Indah, rapih, aman dan nyaman.

Dampak Dari Pengelolaan TPU dikota Bogor terhadap masyarakat Pengguna TPU

Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap strategi yang ditentukan dalam mengelola TPU merupakan sebagai bentuk evaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah Kota Bogor meliputi Kebijakan yang ditentukan dan Sumber Daya Lahan, Sumber Daya Manusia aparatur pengelola serta Sumber Daya Organisasi sebagai instansi pelaksana.

Pertama respon masyarakat pengguna TPU terhadap kebijakan yang

ditentukan masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan yang dibuat Pemkot Bogor, seperti Peraturan Daerah tentang tarif Retribusi (Sewa Lahan) makam, yang asalnya dibayar tiga tahun sekali, namun saat ini masyarakat harus membayar satu tahun sekali dengan nominal yang menurut masyarakat pengguna TPU tidak setimpal dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan baik mengenai SDM, lahan dan fasilitas yang disediakan TPU.

Dan masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bogor tentang pembongkaran makam bagi ahli waris yang tidak membayar retribusi (sewa lahan) makam berdasarkan waktu yang ditentukan. Masyarakat menganggap kebijakan tersebut terkesan tidak berprikemanusiaan. Masyarakat hampir semuanya tidak setuju dengan kebijakan yang ditentukan dalam pengelolaan TPU, seperti TPU memperbolehkan penyewaan lahan untuk cadangan makam hal tersebut masyarakat berasumsi lahan TPU dikuasai oleh masyarakat yang mempunyai Sumber Daya Materi yang kuat

Masyarakat pula melihat /menilai kondisi TPU seperti penataan TPU terkesan semrawut tidak terurus, terutama di TPU cipaku peneliti menemukan respon masyarakat dengan jawaban tidak begitu minat menggunakan TPU Cipaku. Data menentukan respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan TPU.

Tabel
Masyarakat Pengguna TPU di Empat TPU

No	Nama TPU	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	TPU DREDED	85	84
2	TPU BLENDER	90	79
3	TPU CIPAKU	18	34
4	TPU GUNUNG GADUNG	165	225
JUMLAH		358	422
Jumlah keseluruhan Soal		780 soal pertanyaan	
Jumlah Informan		60 orang dari 100	

	informan yang bersedia diwawancara
--	------------------------------------

Jika dihitung secara keseluruhan jumlah jawaban TIDAK lebih banyak dari pada Jawaban YA , secara keseluruhan menandakan bahwa masyarakat merasa TIDAK PUAS dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor melalui UPTD Pemakaman dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Bogor. Artinya dampak yang dihasilkan dari Strategi pengelolaan TPU terhadap masyarakat pengguna TPU, Negatif.

SARAN-SARAN

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa antara lain :

Dalam penelitian ini, peneliti

menyimpulkan bahwa antara lain :

- Strategi pemerintah Kota Bogor yang diterapkan dalam mengelola TPU dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan dalam PERDA, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan Pemakaman.
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan TPU tidak tercapai maksimal hal tersebut terkendala oleh Kualitas SDM, kapasitas SDM tidak memadai dalam mengelola lahan TPU yang begitu luas. Kondisi sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat, serta lemahnya pengawasan dari pihak UPTD Pemakaman terhadap Koordinator TPU. sedangkan

dalam prasarana seperti lahan untuk untuk Tempat pemakaman Umum (TPU) sulit didapatkan karena kota Bogor hampir 70 % sudah perkotaan, maka dari itu pemerintah kota Bogor mengadakan kerjasama dengan menggaet pihak pengembang untuk berinvestasi dikota Bogor sehingga pihak pengembang bisa menyediakan lahan untuk TPU.

- Respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan TPU tidak begitu baik, hal tersebut dikarenakan kebijakan pengelolaan tidak sesuai apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat.

SARAN

- Untuk penentuan kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola harus dipertimbangkan dengan kondisi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- Untuk TPU yang ada ditata dirawat dengan baik sebagaimana dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk penambahan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) jika pengembang tidak ada gunakanlah PAD sebagai anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD).
- Untuk memberi pemahaman tentang kebijakan pengelolaan TPU kepada masyarakat, karena setiap kebijakan dibuat hanya

untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Untuk menunjang pekerjaan, merencanakan, mengatur, mengurus, mengelola, memelihara dan mengawasi perlu ditambahkan lagi dengan sarana yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai pula serta perlu adanya pelatihan yang rutin untuk menambah wawasan dan pengetahuan para aparatur pengelola (TPU) sehingga kinerja pegawai bertambah lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anderson, J.E. 1990. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Mifflin.
- Abdul Wahab, Solichin. 1987. *The Functioning Of Pancasila Ideology In Indonesian Political System Under The New Order Government, MA Thesis (unpublished)*. Institute of Social Studies, the Hague, the Netherland.
- Dimiyati R.M . 2016. Wawancara mengenai strategi pengelolaan TPU di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kota Bogor.
- Dror, Yehezkel, 1964. *Muddling Through-Sciense or Inertia*. Public Administration
- Ericson, R.F. 1970. *The Policy Analisis Role of The Contemporary University*, Policy Scienses(1), pp.429-42.
- Frans, C. Singkoh. (2012). *Peran Elit Politik Dalam Menetapkan Kebijakan Publik Di DPRD, Unnes Law Journal, Vol 2, No 9, Kota Manado*

- Gerstone, Larry N. 2002. **Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide To Civic Engagement**. Center For Civic Education: USA.
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Referensi.
- Junkins, W.I. 1978. **Policy Analysis**. Oxpord: Martin Roberston.
- Kent, George. 1971. **Policy Analysis For Action Recommendations**. ARPA.
- Kutz, David L (2008), *principles of contemporary marketing, south-weaters educational publishing*. Stamped
- Moleong. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. hlm. 3.PT Remaja. hlm.5
- Moleong, J. Lexy. 2015. *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Mulyadi, Dedi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Minarsih, Melinawati.(2013) **Retribusi Pajak Parkir, Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi**, Vol 2, No 9, Banyu Wangi.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor, Nomor 04 Tahun 2012.
- Ragil,widodo.(2014) **Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota**,Unnes Law Journal, Vol 3, No.2, Kota Semarang.
- Rangkuti, Freddy (2009). *Strategi promosi yang kreatif dan analisis integrate markrting communication*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis kebijakan*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia 09 Tahun 1987 Tentang pemakaman umum.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT. Buku Seru. Review.